

# Sekolah Humanis-Religius

Bagian pertama  
dari dua tulisan

Oleh: Sukadari



**MEMPERSIAPKAN** anak didik sebagai generasi penerus yang bertanggungjawab, bermoral, memiliki kemampuan, dan keterampilan, tidak mudah. Penanaman konsep pribadi harus ditanamkan sejak dini karena mendasari perilaku dan kehidupan.

Sekolah sebagai tempat pembelajaran mendukung belajar anak dan kebebasan berkreasikan. Guru dan siswa cenderung sebagai mitra dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dalam koridor saling menghormati sesuai dengan kedudukan dan peran masing-masing.

Masyarakat menyekolahkan anak didasari kepercayaan bahwa sekolah mampu mendidik anak sesuai dengan potensi yang dimiliki dan kodrat. Melayani siswa merupakan unsur utama yang dilakukan guru agar anak dapat mengembangkan diri dengan baik.

Komunikasi antara pengelola pendidikan dengan guru, guru dengan kepala sekolah, siswa dengan siswa, dan guru dengan siswa yang harmonis sangat dibutuhkan. Bahkan masyarakat sekitar mendukung keberadaan lembaga ini. Semua ini dilatar belakangi pihak sekolah yang ramah dan peduli lingkungan.

## Pendidikan humanis-religius di sekolah

Kebudayaan yang selama ini telah diajarkan kepada anak didik kita menjadi kompas perjalanan hidup sehingga menjadi pedoman perilaku bermuara membentuk karakter.

Menjadikan manusia Indonesia seutuhnya yang diidealisasikan menjadi titik puncak pendidikan nasional sebagai proses kemanusiaan sejati masih menjadi dambaan kita, apalagi saat globalisasi terus menerpa. Untuk mencapai manusia Indonesia seutuhnya melalui pendidikan merupakan proses kemanusiaan terus disorot tajam oleh masyarakat.

Istilah kemanusiaan bermakna sifat-sifat manusia, berperilaku sela-

yaknya perilaku manusia normal dan bertindak dalam logika berpikir sebagai manusia. Sifat manusia sebagai makhluk berakal dan berbudi, semakin langka, seolah prosesnya mengalami stagnasi. Oleh karena itu, untuk mewujudkan cita-cita manusia berbudi luhur harus diupayakan sejak dini, salah satunya lewat pendidikan formal sekolah.

Sekolah sebagai pusat kebudayaan dengan berbagai model bertujuan meningkatkan mutu pendidikan dalam membangun manusia Indonesia yang utuh dan berkepribadian Indonesia. Sekolah adalah tempat pendidikan dan proses belajar mengajar; terciptalah masyarakat belajar dan sumber pengembangan kebudayaan. Kebudayaan dalam arti sempit dapat disamakan dengan kesenian yang bertitik berat kepada estetika, sedangkan dalam arti luas dipandang dari dua segi yaitu segi pribadi dan dari segi masyarakat.

Budaya sekolah sebagai acuan proses pembelajaran menerapkan pendekatan humanistik secara empirik. Sebagai sarana utama dalam pembangunan bangsa dan kepribadian luhur ditentukan untuk memberikan perhatian sungguh-sungguh terhadap nilai kepribadian melalui budaya sekolah yang kondusif dalam keseluruhan dimensi pendidikan, dengan cara itu diyakini bahwa pendidikan memberi kontribusi bermakna terhadap pende-  
wasaan anak usia sekolah secara humanis-religius.

Pendidikan adalah bagian dari kebudayaan yang sedang berkembang ke arah peradaban, karena peradaban dinilai lebih tinggi daripada kebudayaan. Sudah sewajarnya sekolah diharapkan dapat menjadi teladan bagi masyarakat, baik secara fisik maupun spiritual. Oleh karena itu, pada hakekatnya budaya sekolah erat dengan pembentukan kepribadian anak didik

di sekolah. Kebudayaan mempengaruhi nilai-nilai yang dimiliki manusia, bahkan mempengaruhi sikap, perilaku maupun kepribadian manusia. Dengan kata lain, manusia merupakan aktor kebudayaan karena manusia bertindak dalam ling-

kup kebudayaan.

Suatu kemustahilan bila suatu bangsa dapat mewujudkan tujuan pendidikan tanpa mempedulikan budaya yang ada. Banyaknya anak bangsa yang akhir-akhir ini mulai luntur mencintai kebudayaan sendiri dan cenderung budaya barat sebagai acuan dalam bertingkah laku sungguh sangat memprihatinkan.

## Dampak teknologi terhadap budaya

Perkembangan teknologi yang kian maju mempunyai dampak yang luas terhadap tata kehidupan di tengah masyarakat mulai dari anak kecil, masa sekolah, masa dewasa, sampai orang tua akan merasakan dampaknya.

Kehadiran TV maupun internet merupakan tanda perubahan peradaban dari suatu ujung garis kontinuen budaya ke ujung garis kontinuen yang lain. Pada saat TV mulai menggantikan institusi keluarga, teman, dan komunitas sebagai titik pusat peradaban, titik interaksi dan pembentukan nilai berpusat pada TV. Peran orangtua bergeser pada saat remote control berada di tangan penonton yang kemudian mengendalikan serangkaian nilai dengan cara menghadirkan suatu yang dia pilih dalam proses konsumsi waktu luang.

TV telah mengaburkan batas-batas fisik dan budaya sehingga menciptakan "deteritoalisasi" suatu dunia baru dengan batas-batas wilayah dan nilai yang bersifat relatif. Untuk itu ada tiga ruang yang dapat dianalisis, sebagai bagian dari titik balik peradaban yang diakibatkan oleh kehadiran tabung TV

yang menjadi jendela dunia tersebut.

## 1. Domminasi Komoditi Simbolik

Program TV, internet, maupun HP secara langsung mentransformasikan sistem nilai yang berlaku, batas-batas usia menjadi kurang begitu jelas. Selera kaum muda telah mengaburkan garis pembatas usia seseorang. Proses konsumsi yang ditunjukkan oleh TV bukan terikat pada kebutuhan, melainkan terikat pada control sosial.

## 2. Konsumsi Etika dan Estetika

Model kehidupan yang dihadirkan dan diproyeksikan oleh TV atau internet menjadi model realitas sosial yang cenderung diikuti akibat *general hysteria* (seruan umum) yang melanda masyarakat modern. Kehidupan sebagai proses etis tampaknya mengalami pergeseran secara mendasar sejalan dengan dominannya nilai simbolik dalam proses kehidupan sosial yang menunjukkan adanya kecenderungan penekanan pada aspek material.

## 3. Sistem Referensi Tradisional

Kenyataan kehidupan sekarang ini sistem nilai tradisional mulai digantikan oleh sistem nilai modern sehingga sistem referensi tidak lagi berkiblat pada tradisi, tetapi pada nilai modernitas dengan logika berfikir yang berbeda. Tradisi dalam TV menjadi komoditi yang estetis sehingga etika suatu tradisi tidak tergambar. Wayang dipahami sebagai hiburan atau sebagai *emancipatory politic* orang modern (yang dulunya *ndeso*) sehingga menghi-langkan nilai filosofis dan etika suatu tradisi. Kecenderungan itu dapat terjadi karena tiga hal yang saling terkait yaitu:

a). Proses transformasi keluarga tradisional ke modern dengan nilai-nilai dan hubungan-hubungan sosial yang berubah. \*\*\*

**Drs. Sukadari, SE, SH, MM., Dosen FKIP Universitas PGRI Yogyakarta dan Mahasiswa S3 Program Studi Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.**

# Sekolah Humanis-Religius

Bagian terakhir  
dari dua tulisan

Oleh: Sukadari

KEMUDIAN point b) dari Sistem Referensi Tradisional adalah berubahnya tata nilai dalam masyarakat dimana kehidupan bukan hanya sekedar melanjutkan naluri masa lalu tetapi telah menjadi arena negosiasi berbagai tata nilai yang tidak hanya lokal dan nasional, tetapi juga global sifatnya.

Point c). Kecenderungan ini terjadi sejalan dengan melemahnya kebudayaan sebagai pengendali dan pewaris sistem nilai. Pusat-pusat kebudayaan, baik itu diwakili kraton atau institusi adat dan keagamaan, telah kehilangan peran dan pengaruh di dalam pencantuman nilai, dan lebih memprihatinkan lagi sudah banyak melanda di dunia pendidikan atau sekolah-sekolah, baik di kota maupun di desa.

## Tujuan pendidikan berwawasan budaya

Tujuan pendidikan di Indonesia sekarang ini tentu sudah jauh berbeda dengan tujuan pendidikan di masa penjajahan Belanda. Undang-undang pendidikan dari waktu ke waktu terus disempurnakan. Sistem pendidikan yang terjadi pada zaman penjajahan selalu bermuatan politik atau kepentingan, sedangkan munculnya undang-undang setelah kemerdekaan berwawasan kebangsaan dan seoptimal mungkin tidak bertentangan dengan kultur budaya sendiri.

Sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia harus selalu menuruti dengan menyesuaikan kehidupan yang ber-susila atau mendasarkan pada norma-norma yang berlaku. Kesusilaan bukan hanya berarti tingkah laku sopan-santun, lemah lembut, kuat, dan berbakti pada orangtua saja, melainkan lebih luas dari itu, yaitu harus menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Banyak orang menafsirkan bahwa cakap sama dengan pandai yang berarti banyak hafal tentang pelajaran yang diberikan di sekolah. Sedangkan yang dimaksud cakap jika orang itu pandai menggunakan daya akal dan pikirannya dengan baik sehingga pekerjaan yang harus dilakukan dengan menggunakan daya akal dan pikiran dapat berlangsung dengan cepat dan lancar. Demikian pula kecakapan itu tidak akan membuahkan hasil yang baik jika tidak disertai syarat kesusilaan. Masyarakat kita memerlukan orang yang menunaikan tugasnya secara cakap dengan



bersendikan kesusilaan. Kesusilaan dapat diwujudkan dengan baik melalui proses budaya yang baik juga.

Akhir-akhir ini budaya kekerasan dan main hakim sendiri makin merebak. Hal itu dapat mengakibatkan krisis di Indonesia.

Beberapa hal penting yang patut kita ajukan yaitu :

1. Terdapat kecenderungan meluas yang diperlihatkan masyarakat untuk keluar dari sistem dan struktur dengan berbagai untuk resistensi dalam berbagai kehidupan sosial. Kondisi ini tentu sangat berbahaya karena kekuatan massa yang begitu besar tidak dimanfaatkan untuk tujuan yang positif.

2. Terdapat kecenderungan munculnya "dual sistem" dalam arti luas dimana keabsahan dan efektivitas sistem yang sesuai mengalami gugatan dari suatu sistem yang diciptakan masyarakat.

3. Budaya kekerasan harus dihentikan karena merupakan sikap dan moral tercermin, memburuknya etika sosial pada berbagai tingkat dan kelompok sosial.

Berbagai upaya untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang berwawasan budaya yang bernuansa humanis religius harus diupayakan

seoptimal mungkin dan semua lapisan harus ikut bertanggungjawab mengantisipasi budaya baru yang kurang relevan dengan pribadi bangsa kita. Melestarikan budaya sendiri yang sesuai dengan tata kehidupan bermasyarakat kita patut dilestarikan.

Dengan mempertahankan budaya sendiri bukan berarti menutup mata dari budaya asing. Munculnya teknologi canggih memang dapat mengacau tata kehidupan suatu bangsa, apalagi masuk di wilayah pendidikan/ sekolah. Oleh karena itu, segala macam budaya yang menopang dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional harus didukung sementara budaya baru yang datang harus selektif untuk menerimanya, sehingga tujuan pendidikan yang berwawasan budaya dapat terwujud tanpa kehilangan pribadi bangsa.

Sekolah seharusnya berwawasan budaya dan bernuansa humanis religius sejalan dengan visi dan misi yang ada di sekolah, disamping mengembangkan ilmu pengetahuan universal, pengamalan agama, penerapan etika, maupun estetika juga diutamakan dapat mewujudkan manusia unggul dalam prestasi berdasarkan Iman dan Taqwa serta berakhlak mulia serta berkarakter dan berkepribadian Indonesia. \*\*\*

**Drs. Sukadari, SE, SH, MM., Dosen FKIP Universitas PGRI Yogyakarta dan Mahasiswa S3 Program Studi Ilmu Pendidikan UNY.**

# Atasi Kekurangan Guru SD Harus Profesional

Oleh: Sukadari

TERJADINYA kekurangan guru Sekolah Dasar (SD) di beberapa daerah sungguh sangat memprihatinkan, mengingat pendidikan dasar merupakan pondasi mewujudkan generasi penerus yang berkualitas. Mengingat pemerintah mencanangkan wajib belajar 12 tahun, kalau pendidikan di tingkat dasar saja belum mapan dan banyak masalah utamanya dalam menjaga kualitas belajar mengajar, bagaimana dengan prospek suksesnya wajar 12 tahun.

Pendidikan yang menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, orang tua dan masyarakat harus benar-benar saling bahu membahu terhadap permasalahan yang ada. Terjadinya kendala proses belajar mengajar utamanya di tingkat SD tidak bisa dipandang ringan, akan tetapi harus disikapi segera agar tidak berlarut menjadi polemik dan kendala.

## Pemerataan guru

Dalam pemerataan guru tidak bisa serta merta guru bidang studi di sekolah menengah langsung dimutasi di SD yang notabene menjadi guru kelas. Kalau hal ini dilakukan dapat menimbulkan masalah baru. Karena guru yang mengajar di SD adalah guru kelas dimana seorang guru harus mampu mengajar beberapa mata pelajaran. Sementara di sekolah tingkat lanjutan pada umumnya memegang satu bidang studi.

Permasalahan yang lain, anak didik di tingkat SD memiliki kemampuan dan karakter yang sangat heterogen.

Untuk mengatasi masalah ini, sebaiknya kerja sama antar daerah yaitu yang daerahnya kelebihan guru SD dapat dialih-tugaskan ke daerah yang kekurangan guru, tetapi juga harus mengingat domisili atau tempat tinggal dari guru yang akan diperintahkan-tugaskan tersebut.

Kebijakan inipun hanya sifatnya sementara sebelum pemerintah mengangkat CPNS guru SD yang difinitif, hal ini juga tidak mudah dilakukan karena menyangkut masalah anggaran

dari masing-masing daerah dan membutuhkan saling pengertian antar daerah. Maka pemerintah pusat tidak dapat lepas tangan kalau memang kebijakan ini benar-benar dilakukan.

## Mutasikan PNS yang berlatar belakang SPG/PGSD

Setiap wilayah atau Pemerintah

guru karena menjadi guru adalah panggilan. Oleh karena itu, hanya bagi PNS yang benar-benar berminat untuk dapat dimutasikan atau diangkat menjadi guru. Keterpaksaan mutasi bisa berakibat kurang baik terhadap dunia pendidikan. Pemerintah daerah harus benar-benar mempertimbangkan

Dalam pemerataan guru tidak bisa serta merta guru bidang studi di sekolah menengah langsung dimutasi di SD yang notabene menjadi guru kelas. Kalau hal ini dilakukan dapat menimbulkan masalah baru. Karena guru yang mengajar di SD adalah guru kelas dimana seorang guru harus mampu mengajar beberapa mata pelajaran. Sementara di sekolah tingkat lanjutan pada umumnya memegang satu bidang studi. Permasalahan yang lain, anak didik di tingkat SD memiliki kemampuan dan karakter yang sangat heterogen.

Daerah ada PNS yang dilatar belakangi pendidikannya SPG atau PGSD atau yang pernah menjadi guru SD tetapi melimpah ke non guru atau sekolah menengah, maka dapat dihibahkan untuk mengajar lagi ke SD.

Bagi PNS yang dahulu juga memiliki latar belakang pendidikan tentang SD bisa diberi kesempatan menjadi guru sekiranya dilakukan juga menguntungkan bagi PNS yang bersangkutan mengingat usia pensiun guru 60 tahun, sementara PNS usia pensiun 56 tahun, ditambah lagi kesejahteraan guru dengan sertifikasi benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan, ditambah lagi sebagai tenaga fungsional pangkat tidak dibatasi.

Memang tidak semua orang berminat untuk menjadi pendidik atau

bagi para PNS yang akan dimutasi di SD. Kualitas adalah lebih utama dari pada kuantitas yang hanya sekedar untuk mencukupi rasio kebutuhan guru. Semua ini akan sangat berpengaruh terhadap lulusan peserta didik.

Pemerintah daerah seyogyanya membuat edaran atau menawarkan kepada para pegawai di lingkungannya dengan memberikan kriteria sesuai dengan profesi yang akan dijalankan. Dengan demikian keterpaksaan tidak akan timbul tetapi dengan dasar panggilan sehingga akan berdampak positif terhadap pekerjaan yang akan dilaksanakan.

## Mengangkat tenaga honorer

Dalam kondisi yang benar-benar mendesak maka Pemerintah Daerah harus berani bersikap, salah satunya

adalah mengangkat guru honorer untuk menopang kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi. Untuk mengangkat tenaga honorer tidak bisa sembarangan, tetapi dengan kriteria yang memadai yaitu pendidikan harus S1 dan berlatar belakang PGSD. Sementara biaya untuk tenaga ini Pemda memberikan insentif sesuai dengan kemampuan daerah atau dibayar dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Seiring dengan jalannya waktu, guru SD banyak yang akan pensiun maka mau tidak mau pemerintah harus mengangkat guru baru. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak Pemda juga harus konsekuen, artinya pada saatnya nanti ada pengangkatan CPNS guru honorer diberi kesempatan dan prioritas untuk menjadi guru CPNS, selagi kualifikasi secara umum terpenuhi. Hal ini sebenarnya sudah ada beberapa waktu yang lalu, adanya guru bantu. Jangan terjadi seperti habis manis sepag dibuang. Bagaimana juga perjuangan pengabdian dan pengalaman adalah mempunyai nilai tambah.

Polemik yang muncul tentang kekurangan guru SD benar-benar menjadi keprihatinan kita bersama, tidak ada jalan lain kecuali harus segera bersikap secara cermat, hati-hati dan proporsional untuk memenuhi kekurangan guru yang profesional kalau persoalan ini berturut-turut sungguh kasihan anak-anak kita yang belajarnya kurang optimal. Hal ini karena di tangan guru yang kadang harus merangkap kelas bahkan kepala sekolah juga mengajar, sementara dituntut administrasi sekolah yang sangat kompleks, belum lagi masalah kemajuan sekolah. Mari kita sikapi bersama dengan arif dan bijaksana agar kualitas pendidikan benar-benar terjaga. \*\*\*

**Drs. H. Sukadari, SE, SH, MM., Dosen Negeri dipekerjakan pada FKIP Universitas PGRI Yogyakarta, S3 Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta (Penyusunan Disertasi).**

## WACANA

# Pendidikan Inklusi Sangat Efektif untuk Pemerataan Pendidikan

Oleh : Sukadari



nya untuk dapat mengikuti pendidikan formal. Dengan dikembangkan sekolah inklusi maka anak dapat tertampung di sekolah terdekat sehingga kemungkinan kecil anak tidak bersekolah. Disamping dapat memberikan kesempatan belajar juga melatih anak beradaptasi dan bersosialisasi dengan anak-anak normal lainnya, sehingga diharapkan kelak mampu hidup di tengah masyarakat umum tidak canggung.

Selama ini secara riil sebenarnya ABK yang khususnya anak tuna grahita/lemah mental sudah ada di sekolah-sekolah, namun penanganan-nya masih disamakan dengan anak pada umumnya sehingga terjadi pemaksaan kemampuan anak harus sama dengan yang lainnya karena menggunakan kurikulum yang sama. Akibat dari perlawanan ini berdampak kurang menguntungkan bagi ABK karena dilayani tidak sesuai kemampuannya yang dampaknya bisa berakibat drop out dan tidak bersekolah lagi. Selain itu, pelaksanaan yang seperti ini dapat menjadikan beban guru dalam kegiatan belajar mengajar. Karena tidak semua pendidik sudah memahami karakter anak ABK.

## Implementasi kurikulum program inklusi

Kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan program inklusi berbeda dengan kurikulum reguler di sekolah umum, karena kurikulum yang ada pada sekolah umum telah dikembangkan sesuai dengan kemampuan ABK, yaitu model kurikulum umum dengan model kurikulum yang dimodifikasi serta model kurikulum yang diindivi-dualisasikan.

Aplikasi dari kurikulum yang dimodifikasi tersebut menggunakan prinsip-prinsip program pendidikan/ pembelajaran individual (PPI) karena setiap peserta didik yang tergolong ABK memiliki hambatan tertentu. Maka perlu pelayanan yang berbeda dari yang lainnya.

Untuk penerapan program ini guru kelas atau bidang studi di sekolah reguler perlu bekerja sama dengan guru Pendidikan Luar Biasa (PLB) dan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus terlebih dahulu untuk menjabarkan Standar Kompetensi Dasar dalam rencana pembelajaran reguler yang dimodifikasi Program Pengajaran Individual (PPI) khususnya untuk ABK.

Dengan demikian implementasi kurikulum program inklusi yang telah dimodifikasi tentu mampu memberikan pelayanan yang tepat. Karena materi atau bahan berorientasi pada peserta didik dan juga memperhatikan masing-masing potensi pada setiap anak, sehingga diharapkan mampu berkembang secara optimal.

## Tantangan bagi guru

Bagi guru yang benar-benar terpenggil untuk menjalankan profesinya sebagai abdi Negara dan pelayan masyarakat, program sekolah inklusi merupakan tantangan untuk mengembangkan wawasan terhadap dunia pendidikan, terutama bidang inklusi.

Memahami karakter ABK menjadi modal utama dalam mengajar anak tersebut, maka kesabaran, keikhlasan dan ketulusan hati harus diutamakan. Sudah selayaknya apabila pemerintah memberikan apresiasi terhadap para guru yang mampu mendidik ABK di sekolah inklusi dengan baik dan berhasil. Penghargaan pemerintah dapat diwujudkan dengan penambahan penghasilan atau yang lainnya sebagai tanda jasa bagi guru yang bersangkutan. Selain hal tersebut di atas yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan wawasan atau pengetahuan guru dengan berbagai cara.

## Pemda MOU dengan lembaga terkait

Untuk meningkatkan program pendidikan inklusi semua pihak perlu menjalin kerjasama yang sinergis

sebab diperlukan lembaga-lembaga lain yang mampu memberikan kontribusi terhadap berkembangnya program ini.

Sebenarnya program pendidikan inklusi ini sudah dilaksanakan beberapa sekolah di seluruh Indonesia namun belum begitu banyak pelaksanaannya secara optimal sehingga perlu penanganan yang serius. Karena banyak faktor yang mempengaruhi terwujudnya program sekolah inklusi, disamping fasilitas yang memadai bantuan dari pemerintah yang dalam hal ini pemerintah pusat bekerjasama dengan pemerintah daerah, juga pelaksanaan oleh para praktisi pendidikan benar-benar dibutuhkan secara profesional. Apabila program sekolah inklusi dapat diperdakan akan lebih kuat lagi, karena tidak ada alasan sekolah umum menolak kehadiran ABK untuk belajar bersama dengan anak normal.

Pemda merupakan pilar utama sebagai penyelenggara program pendidikan inklusi, disamping dana yang dibutuhkan juga bagaimana upaya mengidentifikasi ABK secara tepat terhadap keluarga yang mengalami penyandang cacat (ABK) mau memberikan informasi dan dukungan yang baik tentang keberadaan ABK secara benar.

Semua rencana dan program ini tentu akan berhasil dengan baik apabila semua pihak menyadari bahwa pendidikan merupakan tanggungjawab bersama dan untuk menuntut ilmu serta belajar yang baik juga hak setiap warga Negara Indonesia, tak terkecuali termasuk ABK yang lahir-tidak seperti pada umumnya. Namun sudah sepatutnya diberi kesempatan untuk mengoptimalkan kemampuannya, sehingga kelak mampu menjadi warga Negara yang baik, mandiri, bertanggungjawab, berkepribadian Indonesia, damai, bahagia dan layak hidup di masyarakat umum sebagai pribadi yang bermartabat. \*\*\*

**Drs. Sukadari SE SH MM, Dosen FKIP Universitas PGRI Yogyakarta (UPY) dan mahasiswa Program Doktor (S3) Prodi Ilmu Pendidikan UNY.**

MUNCULNYA sistem pendidikan inklusi yang dicanangkan pemerintah merupakan angin segar dan sekaligus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki sesuai kodratnya.

Walau disadari pengertian tentang pendidikan inklusi belum banyak pihak yang mengerti atau memahami, apalagi sistem pelaksanaannya di sekolah, karena terbatasnya sosialisasi atau mungkin banyak yang merasa tidak berkepentingan untuk mengerti lebih jauh. Pada umumnya masyarakat mengerti ABK yang lazim disebut anak cacat, anak luar biasa, anak berkelainan itu di Sekolah Luar Biasa (SLB), sementara anak tuna netra ada yang sekolah di sekolah umum yang disebut sekolah terpadu.

Pengertian sekolah inklusi sebenarnya tidak hanya mendidik yang mengalami cacat fisik (tuna netra, tuna rungu wicara, tuna daksa) dan tuna grahita/mental, tetapi semua anak yang berkebutuhan khusus seperti anak gelandangan, korban bencana, korban perkosaan dan sejenisnya juga dapat dimasukkan ke sekolah inklusi utamanya di wilayah tertentu.

## Sosialisasi tentang ABK dan inklusi

Berbicara sekolah inklusi dengan sendirinya tentu di dalamnya ada tentang ABK, untuk mewujudkan program pendidikan inklusi para pelaksana di lapangan (tenaga kependidikan) harus faham betul model pendidikannya dan karakter anak ABK. Sementara kenyataan yang ada masih banyak guru yang belum memahami secara komprehensif, maka perlu dilakukan lewat pelatihan, penataran ataupun kunjungan ke Lembaga Khusus misal SLB atau panti tempat menangani anak ABK. Selain tenaga kependidikan juga para pejabat terkait termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Pendidikan termasuk Dewan Sekolah/Komite sekolah Kepala Dinas Pendidikan dan Jajarannya sehingga kebijakan yang diambil akan tepat sesuai kondisi di lapangan yang ada.

## Kesempatan belajar lebih merata

Terbatasnya SLB maka keberadaan ABK diberi kesempatan seluas-luas-